



Politik dan Demokasi Masyarakat Desa Mopolo Esa terhadap Pemilihan Umum pada Tahun 2024

Karnius Lase¹, Romi Mesra^{2*}

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606006@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 02, 2025

Accepted January 31, 2025

Published March 31, 2025

Keywords:

Politik,
Demokasi,
Masyarakat Desa,
Pemilihan Umum



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dan demokrasi masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024, dengan fokus pada respon masyarakat terhadap politik para calon pemimpin, skeptisisme dan kesadaran kritis yang berkembang, serta peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang dilakukan pada November 2023 terhadap informan kunci yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang dipilih secara purposif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari pengalaman dan perspektif informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki respon kritis terhadap politik para calon pemimpin yang dipandang sebagai strategi untuk menarik perhatian, namun tetap mengakui fungsi edukatif dari proses kampanye. Masyarakat menunjukkan skeptisisme yang tinggi terhadap janji-janji politik berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga mengembangkan sikap wait and see untuk menilai kinerja aktual pemimpin yang terpilih. Aparat desa dan tokoh masyarakat memainkan peran signifikan sebagai fasilitator, edukator, dan pengawas informal yang mendorong partisipasi politik yang otonom dan berkualitas, meskipun netralitas mereka perlu dikritisi dalam konteks struktur kekuasaan lokal yang kompleks.

Abstract

This study aims to analyze the political and democratic dynamics of the Mopolo Esa Village community in the face of the 2024 general election, focusing on community responses to the politics of the prospective leaders, their growing skepticism and critical awareness, and the role of village officials and community leaders in the political process. The study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews conducted in November 2023 with key informants consisting of village officials, community leaders, and ordinary citizens selected purposively. Data were analyzed using thematic analysis techniques to identify patterns and themes that emerged from the experiences and perspectives of the informants. The results show that the Mopolo Esa Village community has a critical response to the politics of the prospective leaders, which is seen as a strategy to attract attention, but still recognizes the educational function of the campaign process. The community shows high skepticism towards political promises based on past experiences, thus developing a wait-and-see attitude to assess the actual performance of the elected leader. Village officials and community leaders play significant roles as facilitators, educators, and informal monitors that encourage autonomous and quality political participation, although their neutrality needs to be criticized in the context of complex local power structures.

Keywords: Politics, Democracy, Village Communities, General Elections

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, dimana partisipasi masyarakat dalam proses politik menjadi indikator utama keberhasilan sistem demokrasi tersebut (Dahl, 2001). Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana pemilu 2024 menjadi momentum penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2019). Pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara (Huntington, 1991). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pemilu telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi, dimana masyarakat desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik nasional mengingat mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan (Mas'ood, 2008).

Masyarakat desa memiliki karakteristik politik yang unik dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, dimana pola hubungan sosial yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, kekerabatan, dan patron-klien sangat mempengaruhi perilaku politik mereka (Antlov, 2003). Desa Mopolo Esa sebagai salah satu desa di Indonesia memiliki dinamika politik lokal yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks bagaimana masyarakat desa merespons dan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 (Nordholt & van Klinken, 2007). Studi tentang politik pedesaan menjadi penting karena desa bukan hanya sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki agensi dalam menentukan pilihan politiknya, meskipun seringkali terdapat berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan politik masyarakat desa (Hadiz, 2010). Pemahaman terhadap perilaku politik masyarakat desa menjadi krusial dalam rangka memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput, karena partisipasi politik yang berkualitas di level desa akan berkontribusi terhadap legitimasi sistem politik secara keseluruhan (Sulistyo, 2004).

Partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, kondisi ekonomi, serta peran tokoh masyarakat dan elit lokal (Tornquist, 2013). Dalam konteks pemilu 2024, terdapat dinamika baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif memasuki wilayah pedesaan, sehingga membuka ruang bagi masyarakat desa untuk mengakses informasi politik yang lebih beragam (Lim, 2013). Namun demikian, akses terhadap informasi yang melimpah tidak serta merta meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat desa, karena masih terdapat tantangan berupa literasi politik yang rendah dan kemampuan untuk memilah informasi yang valid (Mietzner, 2020). Fenomena politik uang, mobilisasi massa oleh elit lokal, serta kuatnya pengaruh identitas primordial masih menjadi realitas yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di tingkat desa, sehingga partisipasi politik masyarakat desa seringkali tidak sepenuhnya otonom dan rasional (Aspinall & Berenschot, 2019).

Pemilihan umum 2024 di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dimana kontestasi politik semakin kompetitif dengan munculnya berbagai isu strategis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian utama masyarakat (Warburton, 2016). Dalam konteks Desa Mopolo Esa, pemilu 2024 menjadi momentum untuk melihat sejauh mana masyarakat desa mampu mengartikulasikan kepentingan mereka melalui mekanisme demokrasi elektoral, serta bagaimana mereka menavigasi berbagai tekanan politik yang datang dari berbagai aktor, baik internal maupun eksternal desa (Hadiz & Robison, 2017). Kajian tentang politik dan demokrasi di tingkat desa menjadi penting untuk memahami kompleksitas relasi kuasa yang terjadi, serta

untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif di tingkat akar rumput (Haris, 2005). Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Mopolo Esa berpartisipasi dalam pemilu 2024, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan politik mereka, serta bagaimana mereka memahami dan memaknai demokrasi dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian tentang perilaku politik masyarakat desa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Aspinall dan Berenschot (2019) tentang politik distribusi di Indonesia menunjukkan bahwa dalam konteks pemilu, terdapat praktik sistematis berupa distribusi barang dan uang kepada pemilih, yang menunjukkan bahwa hubungan antara elit politik dan masyarakat desa masih didominasi oleh pola patron-klien dan politik transaksional. Studi tersebut mengungkapkan bahwa meskipun demokrasi elektoral telah berjalan di Indonesia, namun kualitas demokrasi masih dipertanyakan karena partisipasi politik masyarakat seringkali dimotivasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek daripada pertimbangan ideologis atau programatik, sehingga politik uang menjadi fenomena yang masih mengakar kuat di tingkat akar rumput.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hadiz (2010) tentang lokalisme dan politik pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan telah membuka ruang bagi munculnya elit-elit lokal baru yang menggunakan sumber daya ekonomi dan politik untuk mempertahankan dominasi mereka di tingkat lokal. Studi ini mengungkapkan bahwa dalam konteks pemilu, elit lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam memobilisasi massa dan mengarahkan pilihan politik masyarakat desa, dimana mekanisme informal seperti jaringan kekerabatan, patronase, dan kooptasi lebih dominan daripada mekanisme formal partai politik. Hadiz berpendapat bahwa meskipun format kelembagaan demokrasi telah ada, namun substansi demokrasi masih lemah karena akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi masih terkonsentrasi pada segelintir elit, sehingga partisipasi politik masyarakat desa cenderung terbatas dan tidak mampu mengubah struktur kekuasaan yang ada.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tornquist (2013) tentang demokrasi dan pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal seringkali terhambat oleh lemahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil dan minimnya ruang deliberasi publik yang inklusif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan politik, namun efektivitasnya masih terbatas karena tidak menyentuh akar persoalan struktural seperti kesenjangan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan ketimpangan kekuasaan antara elit dan masyarakat biasa. Tornquist menekankan pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat dalam berorganisasi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga demokrasi tidak hanya berhenti pada level prosedural tetapi juga mencapai level substantif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang perilaku politik masyarakat desa dalam konteks pemilihan umum, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi, terutama terkait dengan dinamika politik lokal yang spesifik di masing-masing desa dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan makro atau generalisasi yang kurang mampu menangkap nuansa dan kompleksitas politik di tingkat mikro, sehingga pemahaman tentang bagaimana masyarakat desa secara konkret mengalami, memaknai, dan merespons pemilihan umum masih terbatas. Selain itu, konteks pemilu 2024 memiliki dinamika tersendiri yang belum banyak dikaji, terutama terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, penetrasi media sosial dan teknologi informasi yang semakin masif, serta munculnya isu-isu baru yang menjadi perhatian publik, sehingga diperlukan kajian yang lebih

kontekstual dan mendalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi partisipasi dan pilihan politik masyarakat desa.

Lebih lanjut, penelitian-penelitian terdahulu juga belum secara khusus mengkaji kasus Desa Mopolo Esa yang memiliki karakteristik unik dan dinamika politik lokal yang berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia, sehingga terdapat kebutuhan untuk melakukan studi kasus yang mendalam untuk memahami secara komprehensif bagaimana politik dan demokrasi dipraktikkan di desa tersebut. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dijawab karena pemahaman yang mendalam tentang politik lokal di tingkat desa akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang demokrasi lokal, serta memberikan masukan bagi kebijakan untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada Desa Mopolo Esa dalam konteks pemilihan umum 2024, dimana penelitian ini tidak hanya menganalisis pola partisipasi politik masyarakat tetapi juga berupaya untuk memahami secara mendalam makna dan pengalaman masyarakat desa dalam menghadapi dan terlibat dalam proses demokrasi elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas kehidupan politik di tingkat desa, serta untuk memahami perspektif dan suara masyarakat desa yang seringkali terpinggirkan dalam diskursus politik mainstream. Dengan berfokus pada studi kasus tunggal, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang dinamika politik lokal, termasuk bagaimana berbagai faktor seperti struktur sosial, ekonomi, budaya, dan kepemimpinan lokal saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan analisis tentang dampak teknologi informasi dan media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat desa, yang merupakan fenomena relatif baru dalam konteks politik pedesaan di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana akses terhadap internet dan media sosial membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan bahkan mempengaruhi opini publik, sekaligus juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan manipulasi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pemahaman tentang transformasi politik di era digital, khususnya di konteks masyarakat pedesaan yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat.

Realitas politik di Desa Mopolo Esa dalam menghadapi pemilihan umum 2024 menunjukkan kompleksitas yang menarik untuk dikaji, dimana masyarakat desa berada dalam posisi yang paradoks antara menjadi subjek yang memiliki hak politik dan sekaligus objek dari berbagai kepentingan politik elit. Di satu sisi, masyarakat desa memiliki kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, namun di sisi lain mereka juga dihadapkan pada berbagai tekanan dan rayuan politik yang datang dari berbagai kandidat dan tim kampanye yang berusaha merebut suara mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Mopolo Esa masih sangat bergantung pada pertanian dan ekonomi subsisten, dimana kondisi ekonomi yang terbatas seringkali membuat mereka rentan terhadap politik transaksional dan praktik jual beli suara, meskipun mereka sebenarnya memahami bahwa praktik tersebut tidak baik bagi masa depan demokrasi.

Di sisi lain, terdapat dinamika baru yang muncul di Desa Mopolo Esa berupa meningkatnya partisipasi generasi muda yang memiliki akses terhadap pendidikan dan informasi yang lebih baik, serta memiliki perspektif yang lebih kritis terhadap politik. Generasi muda desa mulai

aktif dalam diskusi-diskusi politik, baik di ruang publik maupun di media sosial, dan mereka berupaya untuk mendorong perubahan dalam cara masyarakat desa memandang dan berpartisipasi dalam politik. Namun demikian, upaya generasi muda ini seringkali menghadapi resistensi dari generasi tua dan tokoh masyarakat yang masih mempertahankan pola politik tradisional, sehingga terjadi negosiasi dan kontestasi antara nilai-nilai politik lama dan baru dalam dinamika politik di desa. Pemilihan umum 2024 menjadi ajang dimana berbagai kepentingan, harapan, dan ketegangan ini bertemu, dan bagaimana masyarakat Desa Mopolo Esa menavigasi kompleksitas ini akan menentukan tidak hanya hasil pemilu tetapi juga arah masa depan demokrasi di tingkat lokal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena politik dan demokrasi masyarakat Desa Mopolo Esa terhadap pemilihan umum tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjektif masyarakat desa dalam konteks sosial budaya mereka, serta memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dan nuansa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang fenomena yang dikaji melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dalam setting alamiah mereka (Denzin & Lincoln, 2011). Dalam konteks penelitian politik di tingkat desa, pendekatan kualitatif sangat relevan karena dapat menangkap dinamika hubungan sosial, nilai-nilai lokal, dan praktik politik informal yang seringkali tidak terlihat dalam data kuantitatif. Metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam dinamika politik di Desa Mopolo Esa. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi yang kaya dan detail tentang pengalaman, pandangan, dan sikap informan terhadap isu yang dikaji (Kvale & Brinkmann, 2009).

Informan dalam penelitian ini meliputi aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang memiliki perspektif berbeda tentang politik dan demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan informan yang beragam bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika politik di desa dari berbagai sudut pandang dan posisi sosial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih dalam dan mengikuti alur pembicaraan yang berkembang secara natural. Proses pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2023 menjelang pemilihan umum 2024, dimana suasana politik sudah mulai menghangat dengan berbagai aktivitas kampanye dan sosialisasi politik dari para calon pemimpin. Waktu penelitian ini dipilih secara strategis untuk menangkap respons dan persepsi masyarakat desa terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung, serta untuk memahami bagaimana mereka memproses informasi politik dan membuat keputusan dalam konteks pemilihan umum. Setiap wawancara dilakukan dengan durasi yang cukup untuk memungkinkan informan menyampaikan pandangan mereka secara bebas dan mendalam, dan peneliti juga melakukan observasi terhadap konteks sosial dan interaksi yang terjadi selama proses wawancara. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif untuk mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat desa dan dinamika politik informal yang terjadi di berbagai ruang sosial seperti pertemuan warga, acara kemasyarakatan, dan diskusi informal. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kategori-kategori yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006).

Proses analisis dimulai dengan transkripsi verbatim dari seluruh rekaman wawancara,

kemudian dilakukan pembacaan berulang terhadap transkrip untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isi dan makna data. Setelah itu, peneliti melakukan pengkodean data dengan mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema yang lebih luas. Proses analisis dilakukan secara iteratif, dimana peneliti terus menerus membandingkan data, kode, dan tema untuk memastikan konsistensi dan validitas analisis. Untuk menjaga kredibilitas dan trustworthiness penelitian, dilakukan triangulasi data dari berbagai sumber informan, serta member checking untuk memverifikasi interpretasi peneliti terhadap pandangan informan (Lincoln & Guba, 1985).

Dalam penelitian ini, aspek etika penelitian dijaga dengan ketat melalui proses informed consent dimana setiap informan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan hak mereka untuk menolak atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan nama samaran atau inisial dalam pelaporan hasil penelitian, dan data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Peneliti juga berupaya untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam proses pengumpulan dan analisis data dengan terus menerus merefleksikan posisi dan perspektif peneliti sendiri yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya yang spesifik pada satu desa sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke konteks desa lain, namun penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik lokal yang dapat memberikan insight berharga untuk memahami fenomena serupa di konteks yang berbeda.

C. Results and Discussion

1. Result

a. Respon Masyarakat Terhadap Politik Para Calon Pemimpin

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki respon yang beragam terhadap politik yang disampaikan oleh para calon pemimpin dalam pemilihan umum 2024. Aparat desa yang menjadi informan penelitian mengungkapkan bahwa politik yang disampaikan oleh para calon pemimpin dipandang sebagai strategi atau trik untuk menarik perhatian publik agar masyarakat mengenal mereka sebagai calon pemimpin. Informan GT selaku kepala lingkungan menyatakan bahwa baik untuk pemilihan presiden, DPR, maupun calon-calon lainnya, politik yang disampaikan pada dasarnya merupakan cara para calon untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kritis dari aparat desa terhadap sifat kampanye politik yang seringkali lebih menekankan pada aspek publisitas daripada substansi program. Namun demikian, aparat desa tetap memberikan respon yang positif terhadap proses politik ini karena menganggapnya sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang harus didukung.

Masyarakat Desa Mopolo Esa dipandang oleh aparat desa sebagai pihak yang sudah memiliki pilihan politik masing-masing, yang menunjukkan adanya otonomi politik di tingkat individu meskipun dalam konteks sosial yang masih kental dengan pengaruh kolektif. Informan GT mengungkapkan bahwa ia melihat masyarakat tentunya sudah memiliki pilihannya masing-masing. Salah satu efek positif dari politik yang disampaikan oleh para calon adalah masyarakat dapat mengetahui karakter, sifat, serta visi dan misi dari masing-masing calon pemimpin. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kampanye politik memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat

desa dalam memahami platform politik para calon, meskipun pemahaman tersebut masih perlu dikritisi lebih lanjut terkait dengan kedalaman dan kualitasnya. Sebagai aparat desa, informan menekankan pentingnya memberikan respon yang baik terhadap proses politik ini, yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga netralitas dan mendorong partisipasi politik yang sehat di tingkat desa.

Tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini juga mengungkapkan pandangan yang cukup kritis terhadap politik para calon pemimpin. Informan JW sebagai tokoh masyarakat menyatakan bahwa ia masih memberikan respon yang baik sejauh ini karena menurutnya para calon belum benar-benar saling berargumentasi atau saling menyampaikan gagasan secara substansial. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ekspektasi dari tokoh masyarakat bahwa kampanye politik seharusnya lebih dari sekadar retorika, tetapi harus menunjukkan debat gagasan yang berkualitas yang dapat membantu masyarakat menilai kapasitas kepemimpinan calon. Tokoh masyarakat menekankan bahwa melalui proses tersebut nantinya akan terlihat mana calon yang memang benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik untuk negara dan mana yang hanya menyampaikan janji-janji saja, yang menunjukkan adanya kesadaran tentang perlunya pemilihan yang rasional dan tidak emosional.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh politik yang disampaikan para calon dan memilih sesuai dengan hati nurani. Informan JW secara eksplisit menyampaikan bahwa masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan politik-politik mereka dan harus memilih sesuai hati nurani. Pernyataan ini mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi manipulasi politik dan pentingnya otonomi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Sementara itu, warga masyarakat biasa yang menjadi informan mengungkapkan bahwa masyarakat sudah banyak mendengar isu-isu politik dari para calon pemimpin, namun sikap mereka cenderung *wait and see*. Informan YW menyatakan bahwa masyarakat hanya melihat saja sampai mana mereka terpilih dan bagaimana kinerja mereka ke depan, apakah sejalan dengan politik yang mereka hanya janjikan. Sikap ini mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap janji-janji politik, yang kemungkinan besar terbentuk dari pengalaman masa lalu dimana janji kampanye seringkali tidak direalisasikan setelah pemilihan.

b. Skeptisisme dan Kesadaran Kritis Masyarakat

Temuan penelitian mengungkapkan adanya tingkat skeptisisme yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Desa Mopolo Esa terhadap janji-janji politik yang disampaikan oleh para calon pemimpin dalam pemilihan umum 2024. Skeptisisme ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pandangan bahwa politik calon hanya merupakan trik untuk menarik perhatian, hingga keraguan terhadap keseriusan para calon dalam merealisasikan visi dan misi yang mereka sampaikan. Informan GT sebagai aparat desa dengan tegas menyatakan bahwa politik-politik yang disampaikan para calon pada dasarnya adalah trik mereka untuk mengambil perhatian masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak lagi dapat dipandang sebagai massa yang pasif dan mudah dimanipulasi, tetapi telah berkembang menjadi pemilih yang lebih kritis dan berhati-hati dalam merespons kampanye politik.

Kesadaran kritis yang ditunjukkan oleh informan penelitian mencerminkan adanya proses pembelajaran politik yang terjadi di tingkat masyarakat desa, dimana pengalaman-pengalaman politik masa lalu membentuk cara pandang mereka terhadap politik kontemporer. Aparat desa menunjukkan kesadaran bahwa politik yang disampaikan para calon adalah strategi pemasaran politik, sementara tokoh masyarakat menekankan pentingnya evaluasi terhadap substansi

gagasan para calon daripada sekadar retorika kampanye. Informan JW secara spesifik menyebutkan bahwa penting untuk melihat mana pemimpin yang baik untuk negara dan mana yang hanya memberikan janji-janji saja. Kesadaran ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa mulai memahami bahwa proses pemilihan tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas atau rayuan kampanye, tetapi harus mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitas calon dalam menjalankan kepemimpinan.

Namun demikian, skeptisisme dan kesadaran kritis ini juga mengandung paradoks, karena di satu sisi menunjukkan kedewasaan politik masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat mengarah pada apatisisme politik jika tidak dikelola dengan baik. Sikap *wait and see* yang ditunjukkan oleh informan YW dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan para aktor politik. Informan tersebut menyatakan bahwa masyarakat hanya melihat saja sampai mereka terpilih dan melihat kinerja mereka apakah sejalan dengan politik yang hanya dijanjikan. Sikap ini jika berkembang lebih jauh dapat menurunkan tingkat partisipasi politik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Masyarakat yang terlalu skeptis mungkin akan kehilangan motivasi untuk terlibat aktif dalam proses politik karena merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan yang berarti.

Kesadaran kritis masyarakat juga tercermin dalam kemampuan mereka untuk membedakan antara calon pemimpin yang *genuine* dan yang hanya mengandalkan janji-janji kosong. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya melihat argumentasi dan gagasan yang disampaikan para calon sebagai indikator kualitas kepemimpinan mereka, yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerapkan standar yang lebih tinggi dalam mengevaluasi calon pemimpin. Imbauan dari informan JW untuk memilih sesuai hati nurani dan tidak mudah terpengaruh oleh politik para calon mencerminkan kesadaran akan pentingnya otonomi pemilih dan perlunya resistensi terhadap berbagai bentuk manipulasi politik. Kesadaran ini merupakan modal sosial yang penting bagi pengembangan demokrasi yang lebih matang di tingkat desa, dimana masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan tetapi juga melakukannya dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

c. Peran Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Proses Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparat desa dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika politik di Desa Mopolo Esa, terutama dalam konteks pemilihan umum 2024. Aparat desa memposisikan diri sebagai fasilitator proses demokrasi yang berusaha menjaga netralitas sambil tetap memberikan dukungan terhadap mekanisme demokratis yang sedang berlangsung. Informan GT sebagai kepala lingkungan mengungkapkan bahwa sebagai aparat desa, ia memberikan respon yang baik terhadap proses politik yang terjadi. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif di desa dan mendorong partisipasi masyarakat tanpa memihak pada calon tertentu. Peran ini sangat krusial karena aparat desa memiliki legitimasi dan pengaruh yang kuat di mata masyarakat, sehingga sikap mereka dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat secara keseluruhan.

Tokoh masyarakat juga menunjukkan peran yang signifikan sebagai *opinion leader* yang memberikan panduan moral dan arahan politik kepada masyarakat. Informan JW tidak hanya memberikan respons terhadap politik para calon, tetapi juga aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih secara rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi politik. Tokoh masyarakat secara eksplisit menyampaikan pesan

kepada warga agar jangan sampai terpengaruh dengan politik-politik para calon dan memilih sesuai hati nurani mereka. Peran edukatif ini sangat penting dalam konteks masyarakat desa yang masih memiliki tingkat literasi politik yang beragam, dimana tokoh masyarakat dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang dipercaya oleh warga.

Tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas informal terhadap proses politik yang terjadi di desa, yang tercermin dari pernyataan mereka tentang pentingnya mengevaluasi substansi gagasan para calon dan tidak hanya terpaku pada janji-janji kampanye. Informan JW menyatakan pentingnya untuk melihat mana calon yang benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik melalui argumentasi dan gagasan yang mereka sampaikan, bukan hanya janji-janji belaka. Peran pengawasan ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat tidak sekadar menjadi objek politik, tetapi juga subjek aktif yang berupaya memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan integritas dan menghasilkan pilihan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh tokoh masyarakat dalam membimbing warga menuju partisipasi politik yang berkualitas.

Lebih lanjut, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa aparat desa dan tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik tentang dinamika politik yang terjadi di desa mereka, termasuk tentang bagaimana masyarakat merespons kampanye politik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan politik mereka. Informan GT mengakui bahwa masyarakat sudah memiliki pilihan masing-masing, yang menunjukkan pengakuan terhadap otonomi politik warga. Namun pada saat yang sama, baik aparat desa maupun tokoh masyarakat menyadari bahwa masyarakat memerlukan informasi dan panduan dalam membuat keputusan politik yang tepat. Pemahaman ini menempatkan mereka dalam posisi strategis untuk dapat memediasi antara kepentingan masyarakat dengan tawaran politik dari para calon pemimpin, serta memastikan bahwa proses politik di desa berlangsung secara damai, fair, dan demokratis.

2. Pembahasan

a. Respon Masyarakat Terhadap Politik Para Calon Pemimpin

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memandang politik para calon pemimpin sebagai strategi atau trik untuk menarik perhatian dapat dijelaskan melalui teori perilaku pemilih yang dikembangkan oleh Downs (1957) dalam konsep rational choice theory. Menurut teori ini, pemilih cenderung bersikap rasional dalam mengevaluasi informasi politik yang mereka terima, dimana mereka akan mempertimbangkan cost and benefit dari pilihan politik mereka. Skeptisisme masyarakat terhadap retorika kampanye menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi politik simbolik yang tidak memiliki substansi nyata. Hal ini sejalan dengan argumen Edelman (1985) tentang politik simbolik, yang menyatakan bahwa dalam kampanye politik seringkali terjadi penggunaan simbol dan retorika untuk memanipulasi persepsi publik tanpa komitmen nyata terhadap perubahan kebijakan. Respon kritis masyarakat Desa Mopolo Esa mengindikasikan bahwa mereka tidak sepenuhnya terpengaruh oleh politik simbolik tersebut, meskipun tetap mengakui fungsi edukatif dari proses kampanye dalam memperkenalkan visi dan misi para calon.

Pandangan aparat desa yang menyatakan bahwa masyarakat sudah memiliki pilihan masing-masing mencerminkan adanya otonomi politik di tingkat individu, yang merupakan salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat menurut Dahl (2001). Dahl menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan preferensi politik mereka tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun

demikian, otonomi politik ini harus dipahami dalam konteks struktur sosial desa yang masih kental dengan pola patron-klien dan pengaruh elit lokal, sebagaimana diungkapkan oleh Scott (1972) dalam analisisnya tentang ekonomi moral masyarakat petani. Scott berpendapat bahwa dalam masyarakat agraris tradisional, hubungan sosial yang bersifat vertikal antara patron dan klien sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat, dimana loyalitas personal seringkali lebih penting daripada pertimbangan ideologis atau programatik. Dalam konteks Desa Mopolo Esa, meskipun terdapat pengakuan terhadap otonomi politik individu, namun struktur sosial yang ada tetap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pilihan politik tersebut dibentuk dan diekspresikan.

Fungsi edukatif dari kampanye politik yang diakui oleh informan sejalan dengan konsep political socialization yang dikembangkan oleh Almond dan Verba (1963), yang menyatakan bahwa proses politik seperti pemilihan umum merupakan wahana penting bagi pembelajaran politik masyarakat. Melalui kampanye, masyarakat mendapatkan informasi tentang isu-isu publik, platform politik para calon, dan mekanisme kerja sistem politik, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan literasi politik mereka. Namun demikian, efektivitas fungsi edukatif ini sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan dan kapasitas masyarakat untuk mengolah informasi tersebut secara kritis, sebagaimana ditekankan oleh Delli Carpini dan Keeter (1996) dalam studinya tentang pengetahuan politik warga negara. Mereka menemukan bahwa pengetahuan politik yang memadai merupakan prasyarat bagi partisipasi politik yang berkualitas, karena pemilih yang memiliki informasi yang baik cenderung membuat keputusan yang lebih rasional dan konsisten dengan kepentingan mereka. Dalam kasus Desa Mopolo Esa, meskipun kampanye politik memberikan informasi tentang para calon, namun skeptisisme masyarakat mengindikasikan bahwa mereka menyadari adanya gap antara retorika kampanye dengan realitas politik, yang menunjukkan adanya pembelajaran politik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

b. Skeptisisme dan Kesadaran Kritis Masyarakat

Skeptisisme masyarakat Desa Mopolo Esa terhadap janji-janji politik dapat dipahami melalui teori political trust yang dikembangkan oleh Norris (2011), yang membedakan antara kepercayaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi (diffuse support) dan kepercayaan terhadap aktor dan institusi politik tertentu (specific support). Norris berpendapat bahwa skeptisisme terhadap politisi dan janji-janji kampanye tidak selalu berarti penolakan terhadap demokrasi sebagai sistem, tetapi lebih mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja elit politik yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa masih mendukung proses demokrasi elektoral, namun mereka skeptis terhadap kredibilitas para kandidat, yang sejalan dengan fenomena critical citizens yang diidentifikasi oleh Norris (1999). Critical citizens adalah warga negara yang memiliki harapan tinggi terhadap kinerja pemerintah dan institusi demokratis, namun seringkali kecewa dengan realitas politik yang ada, sehingga mereka mengembangkan sikap kritis dan skeptis terhadap elit politik. Sikap ini dapat menjadi kekuatan positif bagi demokrasi karena mendorong akuntabilitas, namun juga dapat menjadi ancaman jika berkembang menjadi sinisme yang berlebihan yang mengurangi partisipasi politik.

Kesadaran kritis yang ditunjukkan oleh informan penelitian, khususnya dalam membedakan antara janji kampanye dan kapasitas kepemimpinan yang sesungguhnya, mencerminkan apa yang disebut oleh Freire (1970) sebagai conscientization atau kesadaran kritis. Freire berpendapat bahwa kesadaran kritis adalah kemampuan individu untuk menganalisis secara mendalam realitas sosial dan politik yang mereka hadapi, mengidentifikasi struktur kekuasaan yang menindas, dan mengambil tindakan untuk transformasi sosial. Dalam

konteks politik elektoral, kesadaran kritis berarti kemampuan pemilih untuk tidak sekadar menerima informasi politik secara pasif, tetapi untuk mengevaluasi secara kritis kredibilitas, kompetensi, dan komitmen para calon terhadap kepentingan publik. Imbauan tokoh masyarakat agar warga memilih sesuai hati nurani dan tidak mudah terpengaruh oleh politik para calon mencerminkan upaya untuk mendorong kesadaran kritis ini. Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Gaventa (1982) dalam studinya tentang power and powerlessness, kesadaran kritis saja tidak cukup untuk mengubah struktur kekuasaan yang ada jika tidak disertai dengan kemampuan kolektif untuk mengorganisir dan melakukan aksi politik yang terkoordinasi.

Sikap wait and see yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat dapat dianalisis melalui konsep political efficacy yang dikembangkan oleh Campbell et al. (1960), yang membedakan antara internal efficacy (keyakinan individu bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memahami dan berpartisipasi dalam politik) dan external efficacy (keyakinan bahwa sistem politik responsif terhadap tuntutan warga). Sikap wait and see mengindikasikan rendahnya external efficacy, dimana masyarakat meragukan bahwa suara mereka akan membawa perubahan nyata atau bahwa para pemimpin yang terpilih akan memenuhi janji-janji mereka. Penelitian Pattie, Seyd, dan Whiteley (2004) menunjukkan bahwa political efficacy yang rendah dapat menyebabkan penurunan partisipasi politik dan melemahkan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, Mietzner (2020) mencatat bahwa meskipun demokrasi elektoral telah terkonsolidasi, namun kualitas demokrasi masih dipertanyakan karena rendahnya responsivitas pemerintah terhadap kepentingan publik dan maraknya korupsi, yang berkontribusi terhadap skeptisisme dan apatisisme politik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada aspek prosedural demokrasi seperti penyelenggaraan pemilu yang free and fair, tetapi juga pada aspek substantif seperti akuntabilitas, responsivitas, dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Peran Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Proses Politik

Peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam membentuk dinamika politik di Desa Mopolo Esa dapat dijelaskan melalui teori kepemimpinan lokal dan modal sosial yang dikembangkan oleh Putnam (1993). Putnam berpendapat bahwa modal sosial, yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama, merupakan faktor krusial bagi keberhasilan demokrasi. Dalam konteks desa, aparat desa dan tokoh masyarakat merupakan pemegang modal sosial yang penting karena mereka memiliki jaringan sosial yang luas, legitimasi yang kuat, dan kemampuan untuk memobilisasi masyarakat. Peran mereka sebagai fasilitator dan edukator dalam proses politik menunjukkan bahwa mereka menggunakan modal sosial tersebut untuk mendorong partisipasi politik yang sehat. Namun demikian, sebagaimana diingatkan oleh Bourdieu (1986), modal sosial juga dapat digunakan untuk tujuan yang eksklusif dan mempertahankan dominasi elit, sehingga peran aparat desa dan tokoh masyarakat perlu dikritisi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bertindak untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Posisi netralitas yang diklaim oleh aparat desa perlu dipahami dalam konteks ambiguitas peran yang mereka miliki, sebagaimana dianalisis oleh Antlov (2003) dalam studinya tentang desa dan negara di Indonesia. Antlov menunjukkan bahwa aparat desa berada dalam posisi yang paradoks sebagai perpanjangan tangan negara dan sekaligus sebagai representasi masyarakat lokal, yang seringkali menimbulkan dilema ketika kepentingan negara dan kepentingan masyarakat tidak sejalan. Dalam konteks pemilihan umum, aparat desa diharapkan untuk bersikap netral dan tidak memihak pada kandidat tertentu, namun pada kenyataannya mereka juga memiliki preferensi politik pribadi dan mungkin menghadapi tekanan dari berbagai aktor politik untuk mendukung kandidat tertentu. Hadiz (2010) dalam analisisnya tentang lokalisme

menunjukkan bahwa dalam era desentralisasi, aparat desa seringkali menjadi bagian dari jaringan patronase yang dikendalikan oleh elit lokal, yang dapat mengkompromikan netralitas mereka. Oleh karena itu, klaim netralitas perlu diverifikasi melalui observasi terhadap praktik politik aktual di lapangan, bukan hanya berdasarkan pada pernyataan verbal.

Peran tokoh masyarakat sebagai opinion leader dan pengawas informal proses politik sejalan dengan konsep informal institutions yang dikembangkan oleh Helmke dan Levitsky (2004), yang menyatakan bahwa dalam banyak negara berkembang, institusi informal seringkali lebih berpengaruh daripada institusi formal dalam membentuk perilaku politik. Tokoh masyarakat, meskipun tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan, memiliki pengaruh yang signifikan karena legitimasi tradisional dan kharisma yang mereka miliki. Penelitian Aspinall dan Berenschot (2019) tentang politik distribusi di Indonesia menunjukkan bahwa broker atau perantara politik di tingkat lokal, yang seringkali adalah tokoh masyarakat, memainkan peran krusial dalam menghubungkan elit politik dengan massa pemilih. Namun demikian, peran broker ini juga seringkali terkait dengan praktik politik transaksional seperti politik uang dan mobilisasi berbasis patronase, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Dalam kasus Desa Mopolo Esa, imbauan tokoh masyarakat agar warga memilih sesuai hati nurani menunjukkan upaya untuk melawan politik transaksional tersebut, namun efektivitas imbauan ini sangat tergantung pada kekuatan moral dan independensi tokoh masyarakat dari jaringan patronase politik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan independensi tokoh masyarakat merupakan agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan dinamika politik dan demokrasi yang kompleks di Desa Mopolo Esa dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024, dimana masyarakat menunjukkan respon yang kritis dan skeptis terhadap politik para calon pemimpin. Masyarakat memandang retorika kampanye sebagai strategi untuk menarik perhatian, namun tetap mengakui fungsi edukatifnya dalam memperkenalkan visi dan misi para calon. Skeptisisme yang tinggi terhadap janji-janji politik mencerminkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu dimana janji kampanye seringkali tidak direalisasikan, sehingga masyarakat mengembangkan sikap wait and see untuk menilai kinerja aktual pemimpin yang terpilih. Kesadaran kritis ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak lagi dapat dipandang sebagai massa yang pasif, tetapi telah berkembang menjadi critical citizens yang mampu mengevaluasi politik secara rasional. Namun demikian, skeptisisme yang berlebihan juga dapat mengarah pada apatisisme politik yang mengancam kualitas demokrasi, sehingga perlu dikelola dengan baik melalui peningkatan akuntabilitas dan responsivitas elit politik.

Peran aparat desa dan tokoh masyarakat terbukti sangat signifikan dalam membentuk dinamika politik lokal, dimana mereka berfungsi sebagai fasilitator, edukator, dan pengawas informal proses politik. Meskipun mereka mengklaim netralitas, namun posisi mereka yang strategis dalam struktur sosial desa memberikan mereka pengaruh yang besar terhadap pilihan politik masyarakat. Imbauan untuk memilih sesuai hati nurani dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi politik menunjukkan upaya untuk mendorong partisipasi politik yang otonom dan berkualitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam literasi politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye politik, serta penguatan independensi aparat desa dan tokoh masyarakat dari jaringan patronase politik. Dengan demikian, demokrasi di tingkat desa tidak hanya berhenti pada level prosedural seperti penyelenggaraan pemilu, tetapi dapat mencapai level substantif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1960). *The Voter Decides*. Evanston: Row, Peterson and Company.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (2001). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why It Matters*. New Haven: Yale University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Edelman, M. (1985). *The Symbolic Uses of Politics*. Urbana: University of Illinois Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Gaventa, J. (1982). *Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley*. Urbana: University of Illinois Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488-502.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725-740.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mas'ood, M. (2008). *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227-249.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

- Norris, P. (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pattie, C., Seyd, P., & Whiteley, P. (2004). *Citizenship in Britain: Values, Participation and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91-113.
- Sulistyo, H. (2004). Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy. In A. Crouch (Ed.), *Indonesia in Transition: Rethinking 'Civil Society', 'Region', and 'Crisis'* (pp. 75-95). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tornquist, O. (2013). *Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297-320.